



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

### **SIARAN PERS**

---

### **BPK Perwakilan Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Serang**

**Serang, 26 Mei 2023** – Kepala Perwakilan BPK Banten, **Emmy Mutiarini** menyerahkan LHP atas LKPD Kota Serang Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Kota Serang, H. Budi Rustandi, S.E. dan Wali Kota Serang, H. Syafrudin, S.Sos., M.Si. di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (26/5).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Pemerintah Kota Serang, kembali mendapatkan opini WTP. Pencapaian Opini WTP merupakan upaya dan hasil kerja dari seluruh pejabat dan pelaksana dari Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kota Serang, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Melebihi Ketentuan;
2. Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Memadai.

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per Semester II 2022, Pemerintah Kota Serang telah menindaklanjuti 538 rekomendasi dari 654 rekomendasi atau 82,26% dari seluruh rekomendasi periode 2009–2022. Dengan demikian masih terdapat 116 rekomendasi (17,74%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam sambutannya Emmy Mutiarini menyampaikan harapannya agar Pimpinan DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. “Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ungkap Emmy Mutiarini.